



**Judul** : Politik Anggaran - DPR Sepakat Tak Ada Revisi APBN 2018  
**Tanggal** : Jumat, 20 Juli 2018  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 4

► **POLITIK ANGGARAN**

## **DPR Sepakat Tak Ada Revisi APBN 2018**

JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsuddin menilai pilihan pemerintah untuk tidak mengajukan APBN Perubahan 2018 menjadi hal yang dapat dimaklumi.

Pasalnya, dari perkembangan sejak awal tahun hingga saat ini memasuki Semester II/2018, beberapa indikatornya menunjukkan kinerja yang baik.

Baik dari sisi penerimaan negara yang tumbuh baik, belanja terkendali dengan tingkat serapan sesuai dengan target, sehingga menyebabkan defisit tidak melebar.

"APBN 2018 cukup sehat dan kredibel hingga akhir tahun. Memang ada perubahan dari sisi nilai tukar rupiah dan harga minyak, tetapi tidak sampai memberikan dampak terhadap pendapatan dan belanja negara secara signifikan," katanya, Kamis (19/7).

Hal itu berarti postur APBN 2018 masih cukup ideal untuk diteruskan, sehingga keberlanjutan program pembangunan bisa terus dilakukan hingga akhir tahun.

Dengan demikian, Aziz menegaskan bahwa jika pemerintah mengambil pilihan untuk tidak mengajukan perubahan APBN 2018, keputusan itu merupakan hal yang bisa dimengerti.

Namun, dia memberikan catatan bahwa pemerintah tetap harus terus memantau perkembangan kurs dan

harga minyak dunia, karena kedua hal tersebut yang sedang mengalami fluktuasi. Harapannya pemerintah sudah punya antisipasinya.

Banggar DPR RI pun akan terus melihat perkembangan yang ada sehingga bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah dalam memberikan evaluasi dan pandangan-pandangan terkait pembahasan APBN sekaligus perkembangan ekonomi dunia dan nasional terakhir.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menegaskan perihal keputusan pemerintah yang tidak akan melakukan revisi UU APBN 2018.

Pemerintah telah sepakat segala perkembangan dan gejolak yang ada tidak mengubah postur dari yang direncanakan dalam UU APBN 2018. Kemenkeu nantinya hanya perlu melakukan pemaparan di komisi terkait tanpa perlu kesepakatan di Banggar DPR lagi.

Keputusan untuk tidak melakukan perubahan APBN 2018 ditetapkan karena postur keseluruhan APBN masih dipertahankan dengan baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dari sisi belanja, seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan pada 2018 tetap berjalan. Bahkan pada tahun ini, pemerintah juga mengakomodasi beberapa belanja tambahan misalnya untuk Asian Games dan kebutuhan mendesak lainnya. *(Ipek Ayu H.N)*